



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : DPD RI Sikapi Persoalan Bangsa
Tanggal : Selasa, 13 November 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

DPD RI Sikapi Persoalan Bangsa

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan beberapa sikap terkait beberapa peristiwa yang menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa peristiwa tersebut seperti musibah jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, eksekusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), Tuti Tursilawati, di negara Arab Saudi, dan pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat *tauhid* di Garut yang terjadi beberapa waktu lalu.

Terkait musibah jatuhnya pesawat Lion Air, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkalpinang pada 9 Oktober 2018 di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Nono meminta, agar industri penerbangan yang berorientasi komersial harus mengedepankan unsur keselamatan.

"Tiket murah bukan berarti mengabaikan sistem *safety*. Kemajuan industri penerbangan nasional sangat tergantung kepada kepercayaan publik akan keselamatan terbangnya," ucapnya dalam Sidang Paripurna DPD RI yang digelar pada Senin (12/10) di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen.

Dalam sidang yang juga dipimpin oleh wakil ketua Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam ini, DPD RI meminta agar pemerintah



selaku regulator selalu melakukan pengawasan yang optimal terhadap industri penerbangan nasional. DPD RI juga meminta agar dilakukan audit berkala kepada seluruh kru yang terlibat dalam sebuah penerbangan. Mulai dari pilot, kopilot, staf pendukung, maupun pesawat yang akan diterbangkan. Nono juga meminta agar Komite II DPD RI selaku alat kelengkapan yang membida industri penerbangan dapat turut serta dalam melakukan pengawasan.

"Kita berharap melalui Komite II agar kiranya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan," ucap senator asal Provinsi Maluku ini.

DPD RI juga menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam atas eksekusi mati TKI asal Majalengka bernama Tuti Tursilawati. DPD RI menyangangkan eksekusi yang dilakukan pada 29 Oktober 2018 oleh Kerajaan Arab Saudi ter-

sebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia.

DPD RI juga mendukung pemerintah untuk melakukan protes keras kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Selanjutnya Komite III DPD RI diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKI. Pengawasan tersebut meliputi proses keberangkatan ke luar negeri, PJTKI, penempatan di luar negeri, serta melakukan *monitoring* terhadap nasib mereka di luar negeri. "Hal tersebut merupakan bagian dari tugas negara untuk melindunginya," imbuh Nono.

Sementara, mengenai pembakaran bendera bertuliskan kalimat *tauhid* di Garut, DPD RI meminta agar masyarakat tetap tenang dan menyerahkan kepada proses hukum. DPD RI meminta setiap elemen dapat menjaga kondusifitas, apalagi menjelang Pilpres 2019. "DPD RI berharap agar tercipta rasa saling menghormati dan tidak saling mencuri-gai," ucap Nono. ●ril